



**Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik,
Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)**

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>

Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

The Role Of The Village Government In Distributing Non Cash Food Aid (Bpnt) During The Covid-19 Pandemic In Simpang Empat Village, Bebesen District, Central Aceh Regency

Reza Eka Saputra, Beby Masitho Batubara, & Agung Suharyanto

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universita Medan Area, Indonesia

Abstrak

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang di salurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp.110.000/KPM melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih kurang lengkap nya administrasi penduduk.

Kata Kunci : Peranan; Bantuan Pangan Non Tunai; Pemerintah Desa

Abstract

The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is an assistance that is distributed non-cash from the government to Beneficiary Families (KPM) each month in the amount of Rp. 110,000/KPM through an electronic account mechanism in the form of a Prosperous Family Card (KKS) which aims to improve economic conditions. family. The purpose of this study was to find out how the role of the village government in the distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Simpang Empat Village, Bebesen District, Central Aceh Regency and to find out what factors became obstacles in the distribution of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in the village. Simpang Empat Bebesen District, Central Aceh Regency. The method used by researchers in this study is a descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that the distribution of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Simpang Empat Village, Bebesen District, Central Aceh Regency has not gone well, this is because the population administration is still incomplete.

Keywords: Role,; Non-Cash Food Aid; Village Government

How to Cite: Saputra, R. E. Batubara, B. M. Suharyanto, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(2) 2022: 157-163

*email: agunasuharyanto@staff.uma.ac.id

ISSNxxxx-xxxx (Online)

PENDAHULUAN

Permasalahan Saat ini banyak program peningkatan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan juga mempermudah perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk meringankan kebutuhan pokok penduduk adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan setiap bulan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme rekening elektronik yang hanya digunakan untuk pembelian sembako di lokasi yang layak di tempat-tempat yang bekerjasama dengan bank himbara. (Sitorus, H., Warjio, W., dkk).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mendorong pemerataan manfaat sosial, dan mendorong inklusi keuangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Presiden mengakui bahwa program bantuan pangan non tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka. orientasi dan waktu penerimaan bantuan pangan yang lebih baik dan promosi pembangunan berkelanjutan. Semula, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan pengganti Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa kendala. (Harahap, A., Siregar, N., dkk 2020).

Di sisi lain, ada rumah tangga yang tidak berhak atas Rastra tetapi mendapat dukungan. Kedua, indikator tepatnya masih banyak Rumah Tangga Sasaran Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6kg per bulan dari 4 yang seharusnya 15kg per bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar kebutuhan pokok (khususnya beras) yang Rp 1.600 per kg lebih mahal dari seharusnya.

Dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli sembako (beras, gula, tepung, minyak goreng, dll) melalui agen yang tersedia di lokasi tertentu. Salah satu upaya untuk memerangi kemiskinan adalah Bantuan Pangan Tanpa Uang (BPNT). Ada penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) yang situasi ekonominya dianggap stabil, sedangkan masyarakat dalam kategori miskin lebih cenderung menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) padahal tidak. (Nurmiah, N., Kusmanto, H., dkk 2019).

Peran pemerintah desa sangat penting dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang menjadi acuan pengembangan sektor pangan di suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan mengawal penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Menurut informasi yang dihimpun di tempat, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) masih belum efektif karena masih terdapat kendala dalam penyaluran BPNT ini yang disalurkan di beberapa desa di kecamatan Besesen yaitu ketidaktepatan penyaluran dari bantuan makanan. (Manik, A., Kusmanto, H., dkk 2019).

Penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah skripsi Rohana, Maryanto Demography Journal of Sriwijaya. Universitas Sriwijaya Vol. 3 No. 1 Januari 2019 dengan judul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang Penelitian kedua yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah artikel dari Hikmah Hayati, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2016, dengan judul "Peran Dinas Sosial Dalam penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi Lampung. Penelitian ketiga yang saya gunakan sebagai acuan dalam dalam penyusunan skripsi ini adalah skripsi dari Nunung Iftanul Mustafida Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019, dengan judul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalbaru Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Desa Dan Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor berpendapat dalam Moleong (2010:4) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Lokasi penelitian hal terpenting dalam melakukan penelitian, lokasi merupakan objek penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian adalah di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

Data yang diperoleh melalui beberapa informan. Adapun informan penelitian dibagi menjadi tiga yaitu: Informan Kunci adalah Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa Kampung Simpang Empat; Informan Utama adalah orang-orang yang memiliki pemahaman teknis yang rinci tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Jamilah selaku sekretaris Desa Simpang Empat; Informan pelengkap tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan selain analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah ibu Ichfa dan ibu Rika Eliza

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan, interview (wawancara) sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang informan. Dokumentasi, suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen, surat kabar, dan rekaman. Observasi, sebagai salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadidilapangan

Menurut Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles* dan *Huberman*. Pengumpulan data adalah tahap penerimaan data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Reduksi data Pada dasarnya reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, mengklasifikasi, mengontrol, memperjelas dan memfokuskan dengan menghilangkan hal-hal yang tidak penting dan mengarah pada kesimpulan yang dapat diperhitungkan. Penyajian Data Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan sejenisnya. Kesimpulan Data Kesimpulan Setelah data disajikan, dilakukan inferensi data atau analisis data. Saat mengambil keputusan atau meninjau kesimpulan awal dari ambiguitas ke detail dengan tinjauan dalam arti meninjau catatan dengan maksud agar data yang diterima tidak valid untuk memberikan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Mendata Penerima Bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang di salurkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus covid-19 melalui perpanjangan tangan Pemerintah Desa yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, dalam penelitian ini pemerintah yang terkait dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintahan Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah Desa Simpang Empat dilakukan dengan cara mendata masyarakat di Simpang Empat yang terbagi dalam Empat (4) dusun, yang kemudian dari pendataan tersebut dipilih masyarakat yang dinilai kurang mampu berdasarkan tingkat ekonominya atau penghasilan perbulunya yang dimana tergolong rendah dari penghasilan masyarakat lain pada umumnya.

Pendataan untuk pembagian bantuan yang di salurkan unutm masyarakat yang terdampak dalam penyebaran virus covid-19 di Desa Simpang Empat tersebut langsung dilakukan oleh

perangkat desa agar bantuan yang akan di salurkan itu tepat sasaran dan langsung diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya, adapun perangkat desa tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pengulu dari beberapa dusun yang terdapat di Desa Simpang Empat.

Adapun cara pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan cara mengumpulkan KK (Kartu Keluarga) dari setiap masyarakat yang ada di beberapa dusun yang ada di Desa Simpang Empat dan melakukan pemilihan berdasarkan pekerjaan dari masing-masing masyarakat

Untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan pendataan maka peneliti mewawancarai Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa Simpang Empat dan juga sebagai informan kunci juga menuturkan sebagai berikut: "Sebelum melakukan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di salurkan oleh pemerintah ini, kami selaku Pemerintah Desa sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan ini, adapun pendataan yang kami lakukan adalah berupa pengumpulan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar kami dapat melihat mana masyarakat yang berhak menerima dan mana masyarakat yang tidak berhak menerima". (Hasil Wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021, Jam 08.38)

Sosialisasi. Setelah pendataan selesai yaitu telah diperoleh nya data masyarakat yang kurang mampu atau yang tergolong miskin berdasarkan tingkat ekonominya. Kemudian aparatur desa yaitu Kepala Desa melalui perpanjangan tangan yaitu Kepala Dusun untuk melakukan sosialisasi langsung dan melihat langsung masyarakat yang berhak dan tidak berhak untuk menerima bantuan tersebut. Dan sosialisasi yang di sampaikan oleh Aparatur Desa tersebut tentang kapan bantuan itu akan di berikan dan apa saja jenis bantuan yang di berikan, dan sosialisasi ini dilakukan sebulan sekali dalam pembagian bantuan tersebut.

Untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan sosialisasi maka peneliti mewawancarai Ibu Jamilah selaku Sekretaris Desa Simpang Empat dan juga sebagai informan kunci juga menuturkan sebagai berikut: "Setelah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menerima bantuan tersebut kami melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang kapan bantuan itu akan diterima dan dalam bentuk apa saja bantuan tersebut di bagikan" (Hasil wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021 jam 09.24)

Evaluasi. Alangkah baiknya jika pejabat dan staf yang terlibat dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berinisiatif dan bekerja sama untuk melakukan peninjauan untuk mengidentifikasi alur dan hambatan program, serta langkah-langkah untuk memantau dan mengevaluasi system bansos dan perangkat desa untuk program BPNT dan untuk memenuhi persyaratan BPNT.

Pejabat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus lebih teliti lagi dalam memilih siapa yang dapat menerima bantuan tersebut. Dalam hal sosialisasi, sebaiknya pihak yang berwenang memaksimalkan pelaksanaan agar merata, dengan mengikutsertakan semua elemen yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut, terutama bagi masyarakat yang benar-benar difabel atau di bawah garis kemiskinan ikut serta dalam sosialisasi.

Untuk mengetahui bagaimana peran suatu kebijakan dalam memperlancar pelaksanaan program kesejahteraan khususnya cashless bagi masyarakat di Desa Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, maka penyaluran Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) akan dilakukan secara bertahap di beberapa tahapan sejak Januari 2017 di wilayah-wilayah terpilih, antara lain berdasarkan kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan pangan dan perdagangan eceran, serta dukungan dari pemerintah kota.

Dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah desa Pemerintah Pusat Aceh memegang peranan yang sangat penting agar program dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pemerintah desa, didukung oleh camat, aparat desa dan pendamping. Keberhasilan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur dari derajat pemenuhan indikator 6T yaitu Tepat Tujuan, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Manajemen.

Untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan evaluasi maka peneliti mewawancarai Ibu Jamilah selaku Sekretaris Desa Simpang Empat dan juga sebagai informan kunci juga menuturkan sebagai berikut: “Setelah melakukan semua prosedur yang telah ditetapkan seperti melakukan pendataan, melakukan evaluasi, kami selaku aparatur desa tentunya melakukan evaluasi terkait dengan pembagian bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi tetap saja masih menemukan sedikit kendala seperti kurang lengkapnya administrasi penduduk” (Hasil wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021 jam 09.24)

Kendala dalam melakukan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masa Pandemi Covid 19 di Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran bantuan non tunai (BPNT), diantaranya lemahnya sistem pendataan atau kurangnya data penerima manfaat non tunai (BPNT), tidak sesuai rencana, penyaluran Bantuan tidak tepat waktu, pengelolaan kependudukan yang mapan dan tidak lengkap.

Untuk mengetahui apakah kendala Pemerintah Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah maka peneliti mewawancarai Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa Simpang Empat dan juga sebagai informan kunci juga menuturkan sebagai berikut:

“Dalam penyaluran bantuan ini kami aparatur desa masih menemukan ada beberapa kendala yang menghambat kami untuk melakukan pembagian bantuan ini yang dimana biasa kami membagikan bantuan ini setiap awal bulan tapi malah tertunda karena kendala seperti kurangnya administrasi penduduk, waktu pembagian tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga masyarakat bertanya-tanya kapan dibagikan bantuan tersebut, kami dari pihak aparatur desa tetap membagikan bantuan tersebut walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu yang disaat kami melakukan sosialisasi”. (Hasil wawancara pada hari Rabu, 10 Maret 2021 jam 09.24)

SIMPULAN

Pemerintah Desa Simpang Empat, perpanjangan tangan Kementerian Sosial, berperan penting dalam pendistribusian bantuan pangan nontunai (BPNT) secara tepat waktu, kualitatif dan tepat. Agar program Bantuan Pangan Tanpa Uang (BPNT) berhasil, mekanisme penyalurannya harus diatur dengan baik. Disebut Dream atau E-Warong bekerja sama dengan Bank Penyalur. Hambatan bagi pemerintah desa Simpang Empat untuk menyalurkan bantuan pangan tanpa uang tunai (BPNT) adalah: sistem pendataan/tidak ada pendataan keluarga penerima manfaat (KPM), pengelolaan kependudukan yang tidak tepat, tidak tepat waktu dan tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 59-69
- Azmi, A., Isnaini, I., & Kusmanto, H. (2019). Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 11-21
- Br Simbolon, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 145-155
- Emilia, Dinda. Nasution, H.M.H Thamrin. & Dewi, Rosmala. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Samsat Medan Selatan Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 26-31
- Halawa, N. Kadir, A & Matondang, A (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 45-53
- Harahap, A., Siregar, N., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79-88

- Herawati, R., Sihombing, M., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 26-38.
- Hidayat, R., Badaruddin, B., Warjio, W., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 14-25.
- Hikmah, Hayati. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkoataan Provinsi Lampung.8(2),1-15.
<http://repository.radenintan.ac.id/7149/1/SKRIPSI%20AHDA>
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-desa-untuk-tanggulangi-covid-19>

Internet

- Kementerian Sosial, (2018). *Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 22-31
- Lestari, A. Muda, I. & Dewi, R. (2019). Sistem Pengelolaan Arsip Pada Biro Sekretariat Dan Umum Kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 39-44,
- Mandasari, D. Nasution, M.T. & Sembiring, W.M. (2019). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara (GUBSU) Tahun 2018 di Kecamatan Galang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 73-80,
- Manik, A., Kusmanto, H., & Lubis, M. (2019). Analisis Reliabilitas dan Responsivitas dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 65-74
- Meiniara, P., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Independensi Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 184-197
- Melni, A., Hasibuan, E.Y. & Suharyanto, A. (2019). Strategi Komunikasi Pemasaran @Lapo Mandailing Coffee Pada Media Sosial Instagram di Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 12-17
- Mustafida & Nunung Ifanatul. (2019).Implementasi program BPNT di Desa Kajaharjo Kecamatan Kalibura Kabupaten Banyuwangi
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52-64
- Nazlia, N. Kusmanto, H, Hasibuan, M.A. & Jamil, J. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 18-25,
- Nurmiah, N., Kusmanto, H., & Lubis, Y. (2019). Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 176-183.
- Pandiangan, A. Kadir, A. & Lubis, Y.A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 66-72,
- Pasaribu, S., Harahap, R., & Mardiana, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 70-78
- Poedjianto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43-51.
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47
- Roberto, S.A.. Kadir, A. & Angelia, N. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 32-38,
- Rohana Tiara & Maryanto. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang.*Demography Journal of Sriwijaya*.3(1), 37-46.

- Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89-98
- Sari, P.A. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 1-11
- Sinaga, A., Kadir, A., & Mardiana, S. (2019). Peranan Motivasi Kerja Dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 32-42
- Sinaga, A., Kadir, A., & Mardiana, S. (2020). Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 89-97
- Sirait, N., Warjio, W., Harahap, D., & Kadir, A. (2019). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam hal Disiplin Kerja di Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 165-175
- Sitorus, H., Warjio, W., & Isnaini, I. (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 98-106
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syari, N., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 156-164
- Tanjung, M., Kusmanto, H., Warjio, W., & kadir, A. (2019). Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 82-88.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2017 Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta Pusat: UndangUndang,
- Wiryadi, R., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pencatatan AK 1 dalam Memberikan Kepuasan kepada Masyarakat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 48-58
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75-81